



PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
2025 - 2029

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Jember



Drs. MURDIYANTO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 196603301 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	16
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	20
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember..	20
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	20
2.1.2 Sumber daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	25
2.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	27
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.....	28
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.....	29
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan PD	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.....	30
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.....	32

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	36
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	37
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	38
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW	40
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS	40
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	42
Gambar Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	44
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan penting substansial	73
5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah) ..	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesimpulan penting substansial.....	40
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Jember	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember	35
Gambar 4.2 Cascading	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan

sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan ValidasiPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor3 Tahun 2025 tentangRencanaJangkaMenengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor5 Tahun2024tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami

arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Perpustakaan memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta pemanfaatan media teknologi informasi untuk layanan perpustakaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok sesuai pasal 6 ayat 2 memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan layanan dan teknologi informasi perpustakaan;

- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan layanan dan teknologi informasi perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah dan pesantren sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- d. Pelaksanaan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria layanan perpustakaan masyarakat, sekolah dan pesantren;
- e. Pelaksanaan pembinaan perpustakaan khusus tingkat Kabupaten;
- f. Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten;
- g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan evaluasi program pengembangan perpustakaan untuk program pengembangan budaya baca masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten dan mengembangkan kegiatan literasi informasi pada segenap aspek kehidupan masyarakat;
- i. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten;
- j. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan kegiatan pelestarian naskah kuno dan local konten milik Kabupaten Jember; dan
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

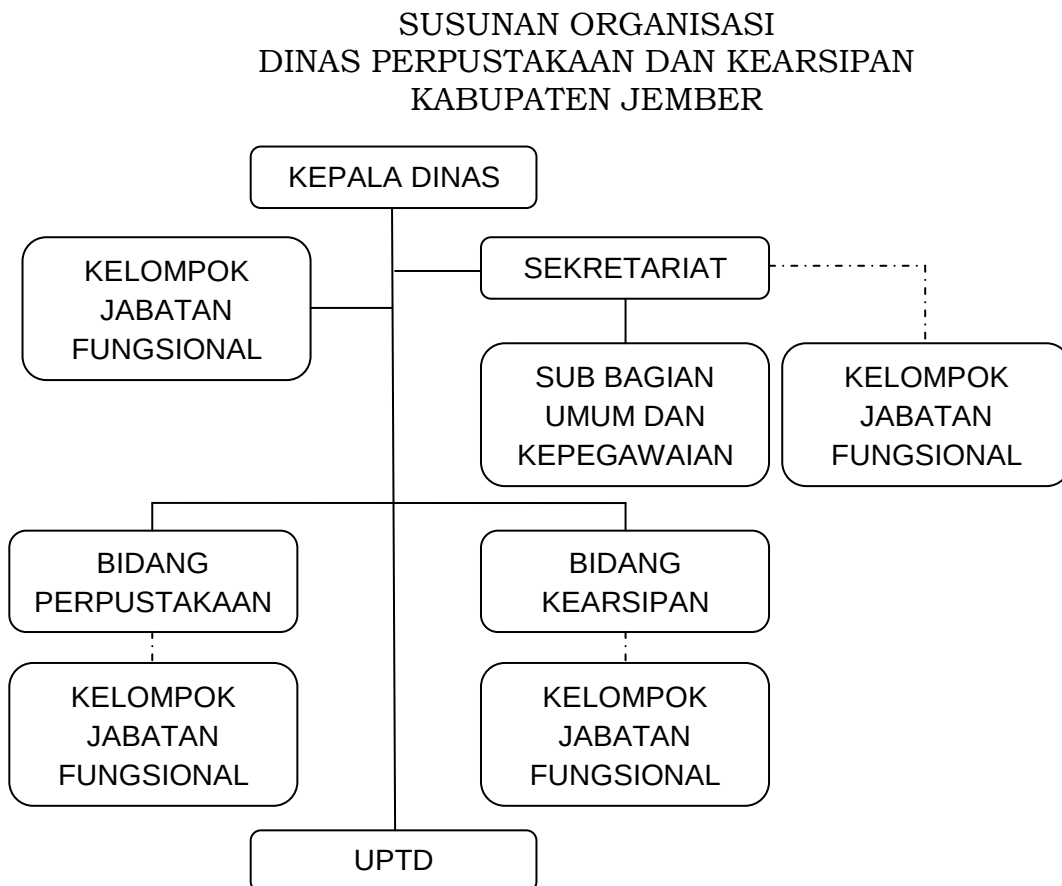
Bidang Kearsipan memiliki tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan layanan kearsipan, pengembangan dan pengelolaan arsip daerahserta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas. Bidang Kearsipan dalam menjalankan tugas pokok sesuai pasal 7 ayat 2 memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip daerah;
- b. Pelaksanaan pendataan, analisa data dan identifikasi kebutuhan pembinaan dan pengelolaan arsip daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan kearsipan dengan pihak terkait;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penyelamatan arsip dinamis, arsip aktif dan arsip statis;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan Simpul Jaringan dalam SIKN melalui JIKN;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan dan penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- g. Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Kabupaten Jember yang memiliki retensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala Kabupaten;
- i. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- j. Autentifikasi arsip statis dan arsip arsip hasil alih media Kabupaten;
- k. Pencarian arsip statis Kabupaten yang dinyatakan hilang; dan
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



2.1.2 Sumber daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Pelaksanaan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi

maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari 14 (empat belas) orang PNS. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebanyak 14 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 (satu) Orang
2. Eselon III : 2 (tiga) Orang
3. Eselon IV : 1 (satu) Orang
4. Pejabat fungsional: 4 (lima) Orang
5. Staf/Non Eselon : 6 (enam) Orang

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 4 (empat) Orang
2. Sarjana S-1 : 6 (enam) Orang
3. Diploma -3 : 1 (satu) Orang
4. SLTA : 3 (empat) Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 14.995.170.812,-(Terbilang : Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah)

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	2	589.370.000				
2	Peralatan dan Mesin	584	6.867.811.012				
3	Gedung dan Bangunan	4	3.000.137.757				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0				
5	Aset Tetap lainnya	43.256	3.073.470.643				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	0	0				
7	Aset Lainnya	94.214	1.464.381.400		10	40.300.000	Rusak

2.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember meliputi Urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Pada periode Renstra 2021-2026 Layanan urusan Perpustakaan dengan tujuan Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Urusan Kearsipan dengan tujuan Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik dengan Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Kabupaten Jember, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Persentase peningkatan layanan perpustakaan sesuai standar				10	10	10			10,5 3	10,9 0	5,29			105,3	109	52,9		
2	Persentase perangkat daerah, BUMD dan pemerintah desa/kelurahan yang mengelola arsip secara standar				20	20	20			15,6 3	27,5 5	17			78,1 5	137 ,75	85		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Perpustakaan selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi pelayanan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi . Hanya Kegiatan Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca dengan target jumlah pengadaan buku pada tahun 2024 tidak terealisasi. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara usulan pengembangan koleksi buku dengan ekatalog sehingga buku yang diminati belum sepenuhnya tercover di ekatalog. Untuk urusan Kearsipan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan, kegiatan dilakukan dalam bentuk layanan dan pembinaan secara luring dan daring. Pelaksanaan

kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapunrealisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Uraian Program *)	AnggaranPada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggararan Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggar an	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.834.382.174	5.604.084.146	4.636.795.738			4.667.125.780	4.563.295.168	3.755.546.734			76,54	81,43	80.99				
Program Pembinaan Perpustakaan	426.924.500	731.191.000	281.398.800			415.900.875	646.323.698	59.040.000			97,42	88,39	20.98				
Program Pengelolaan Arsip	256.847.800	751.823.825	134.456.200			251.877.550	720.411.008	62.880.000			98,06	95,82	46,77				

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan publik. Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan dan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Adapun kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 meliputi:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
2. Masyarakat Umum / Pemustaka Kabupaten Jember
3. Perpustakaan Binaan Perpustakaan Umum meliputi Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa / Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas diurusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang perpustakaan dan bidang

kearsipan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca masyarakat Kab. Jember	1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Terbatasnya SDM perpustakaan secara kuantitas dan kualitas.	1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan. 2. Kurangnya promosi perpustakaan hingga ke pelosok desa. 3. Kurangnya sosialisasi minat budaya baca 4. Masih terbatasnya jenis koleksi buku perpustakaan yang <i>up to date</i> baik buku Perpustakaan konvensional maupun <i>ebook</i> . 5. Sarana prasarana perpustakaan masih perlu banyak perbaikan dan penambahan. 6. Pengembangan perpustakaan desa masih belum dilaksanakan secara maksimal.
2.	Belum terwujudnya tata kelola kearsipan yang baku	1. Implementasi penyelenggaraan kearsipan dinamis pada pencipta arsip / pe rangkat daerah belum optimal.	1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola kearsipan dan tidak adanya tenaga fungsional khusus / arsiparis. 2. Kurangnya pengetahuan tentang kearsipan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan arsip kurang

		2. Ketersediaa kebijakan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip belum optimal. 3. Implementasi pengelolaan arsip inaktif perangkat daerah belum optimal.	diperhatikan. 3. Kurangnya sarana prasarana kearsipan yang mendukung pelaksanaan tata kelola kearsipan. 4. Jaringan kearsipan OPD belum terbangun / terintegrasi. 5. Kurangnya kepercayaan OPD untuk menitipkan arsip di depo arsip. 6. Kurangnya sosialisasi tata kelola kearsipan dari Lembaga Kearsipan daerah. 7. Belum optimalnya digitalisasi dokumen / arsip daerah.
--	--	--	--

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

1. Pokok visi pertama: ***"Dengan Cinta"***

Pokok visi yang pertama yaitu ***"dengan cinta"*** mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (*spirit*) dan kesungguhan seluruh actor pembangunan (*Stakeholders*) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Maknavisi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu ***"berakhlak"***. Dimana "berakhlak" merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisipemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat akan

menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi “**dengan cinta**” menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan **penyuh cinta** dan **dedikasi** yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen pada untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember untuk lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: “**Jember Baru**”

Pokok visi kedua yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumber daya akan dapat dimanfaatkan dengan optimal. **Jember Baru** adalah pandangan ke depan (*vision*) mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lainnya. Perwujudan “**Jember Baru**” dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan baik internal maupun eksternal, Jember yang siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta Jember yang siap bersaing.

Dengan demikian pokok visi “**Jember baru**” ini jugamengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu “**berdaya saing**”. Harapanutama adanya transformasi daerah menjadi “**Jember Baru**” adalah terciptanyakesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa kualitas hidupmasyarakat akan meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadappendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar.Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakansumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: “**Sejahtera**”

Pokok visi ketiga “Sejahtera” merupakan puncak (*Ultimate*) dari tujuanpembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yangterintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakatdi Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dansosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaanlapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yangdinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif akan berdampak pada daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakanunsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangkawaktu yang lama (*Long Term*). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraanakses dalam setiap layanan dasar meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan,kebebasan politik, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukunganinfrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: “**Maju**”

Pokok visi keempat “**Maju**” merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata “maju” pada dua lokus utama, yaitu: **pertama**, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan yang massif akan menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. **Kedua**, ditekankan pada wilayah perkotaan (*Urban Area*). Sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, maka orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis *green Policy*, dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu “**berkelanjutan**”. Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis *green policy* merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik.

Gambar Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025 - 2029



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 - 2029. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember setiap tahun b. Adanya struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan	a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan bidang kearsipan b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI), Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Perpustakaan Nasional dan ANRI menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan sebagai berikut:

2.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat	Adanya kesenjangan antara rencana aksi dengan kecukupan anggaran	Kesadaran berliterasi Semakin meningkat	Ketersediaan fasilitas baca dan partisipasi stakeholder belum maksimal
	Tingkat ketercukupan tenaga perpustakaan	Peningkatan jumlah SDM pengelola perpustakaan	Anggaran kurang memadai, SDM Pustakawan kurang
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Pemahaman serta SDM yang kurang memadai menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap Kebijakan Publik belum dapat terlaksana dengan baik.	Terlaksananya pembinaan dan monitoring Tata Kelola Kearsipan sehingga memberikan pemahaman pengolahan arsip pada setiap instansi terkait kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan	Keterbatasan SDM, baik Teknis maupun Fungsional Arsiparis sehingga tingkat kepatuhan masih rendah
Meningkatnya ketersediaan	Unit Kearsipan dan Unit Pengolah pada	Terlaksananya kegiatan akuisisi	Arsip yang autentik dan

arsip yang autentik, utuh dan terpercaya secara nasional	masing-masing OPD belum mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan dalam Melaksanakan pengelolaan arsip.	dan preservasi dokumen arsip.	terpercaya tidak dapat ditemukan kembali karena Pengolah arsip tidak mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan dalam melaksanakan pengelolaan arsip.
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Keterbatasan SDM dan sarana/prasarana pendukung serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip pada setiap instansi pemerintah	Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam pemanfaatan dan pengolahan arsip.	Keterbatasan SDM teknis dan fungsional Arsiparis, baik di LKD maupun pada Unit Kearsipan pada setiap instansi.
Terwujudnya tata Kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Keterbatasan Pemahaman tentang Tata Kelola Kearsipan pada setiap Instansi yang mempengaruhi Indeks Reformasi Birokrasi	Tersedianya Draft Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang telah disetujui oleh Kepala ANRI guna meningkatkan penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi	JRA masih belum diundangkan menjadi Perbup serta Tingkat Kepatuhan dalam melaksanakan penyusutan Arsip belum terlaksana dengan baik.

2.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya literasi dan kegemaran membaca	Ketercukupan unsur pendukung yang selaras dengan rencana aksi	Keberpihakan minat baca masyarakat yang cenderung meningkat	Adanya force majeure antara lain pandemic covid 19

masyarakat ditandai meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	meningkatkan indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca		
Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Ketersediaan sarana/prasarana serta kebutuhan SDM Pengolah Arsip yang belum terpenuhi.	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Monev Tata Kelola Kearsipan bagi OPD dan Pemerintah Desa serta Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	Keterbatasan SDM Teknis dan Fungsional Kearsipan serta sarana/prasarana yang belum terpenuhi
Meningkatnya khasanah Arsip Provinsi Jawa Timur	Ketersediaan arsip yang dapat ditemukan dan diakses masih sangat terbatas.	Pembuatan Daftar Arsip dan Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Arsip yang autentik dan terpercaya tidak dapat ditemukan kembali

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruangwilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanianberkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasispotensi lokal”.Dengan demikian,dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perwujudan pusat kegiatan perpustakaan desa	Sumber Daya Manusia yang mendukung Layanan Perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis inklusis sosial	Sarana dan prasarana yang kurang memadai

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Masih rendahnya kualitas SDM Pengolah Arsip	Ketersediaan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Arsip sesuai dengan Standar	Tidak tersedianya tenaga pengolah arsip dengan latar belakang Pendidikan linier

		Operasional Prosedur (SOP) Kearsipan serta Peraturan Perundangan	
--	--	--	--

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu **“Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju”** dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-2 yakni **“Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara”**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
- Meningkatnya Akses Pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tatakelola Arsip Pemerintahan Yang Akuntabel		Indeks pembangunan literasi masyarakat dan Nilai Hasil Pengawasan	55,45	65	75	85	95	100	100	
		Meningkatnya Gemar Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	62,7	70	80	85	90	100	100	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87	88	89	90	91	92	93	

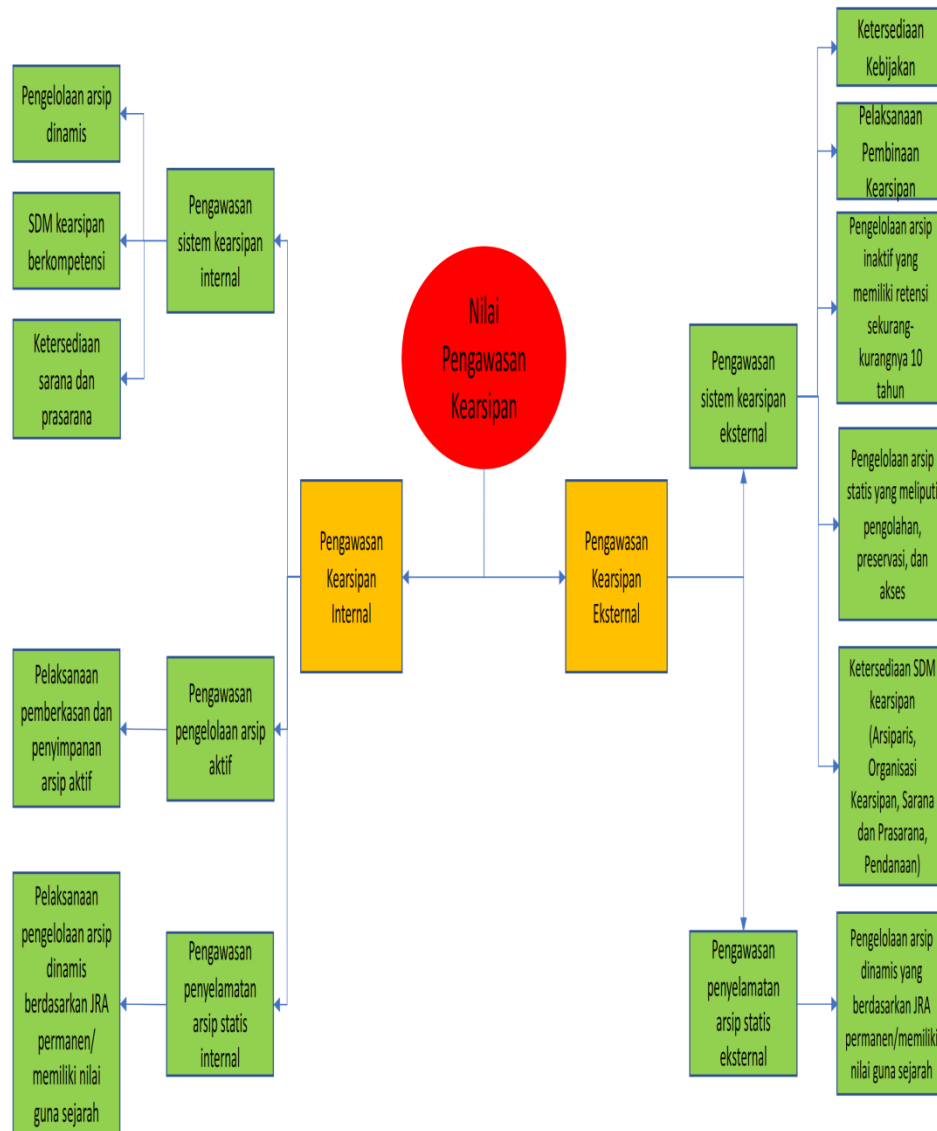
		Meningkatnya tata kelola arsip	presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara standar(Nilai)aerah (Nilai)	57,4	65	70	75	80	85	90	
--	--	--------------------------------	---	------	----	----	----	----	----	----	--

Logical Framework Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

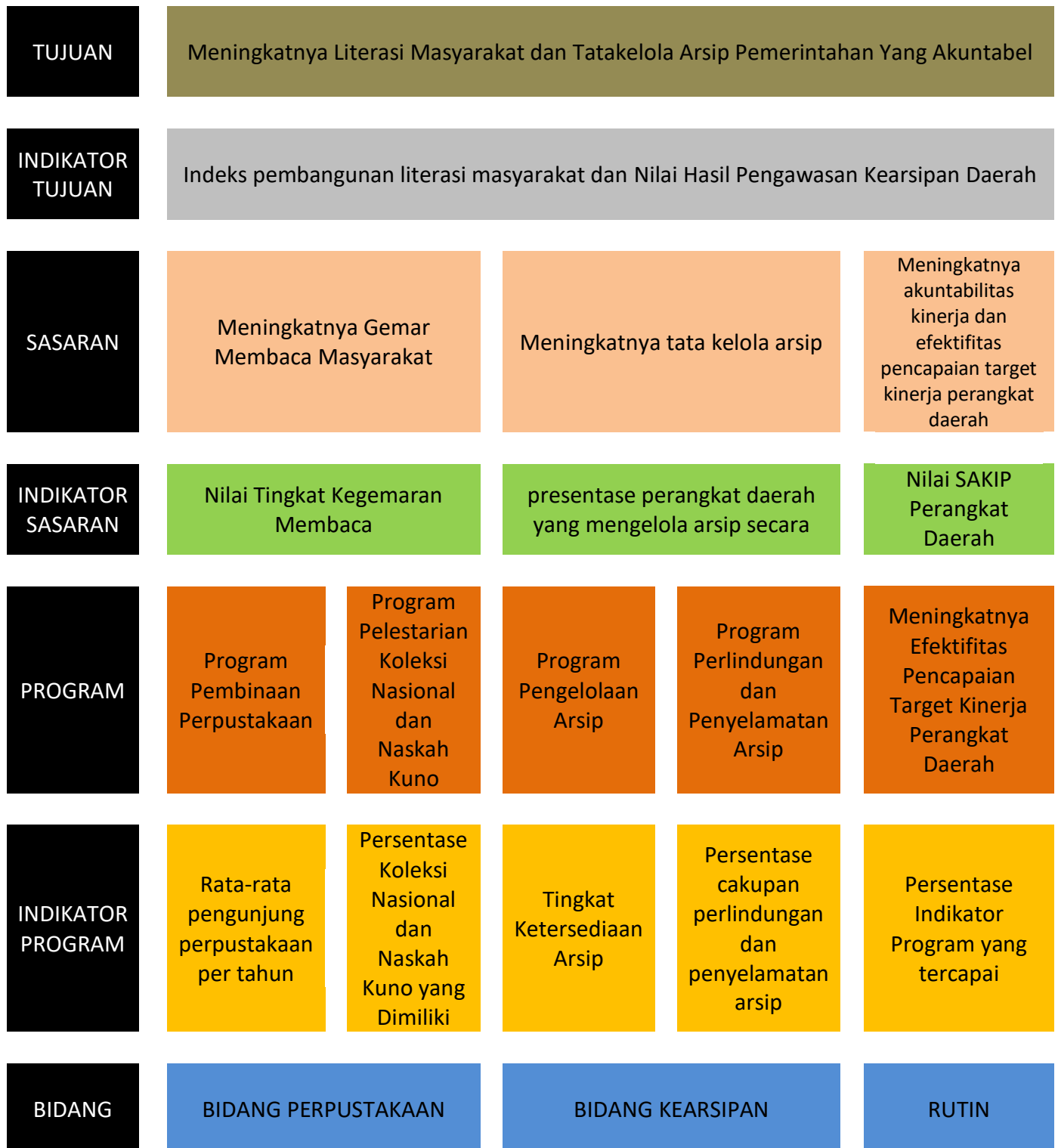
Urusan Perpustakaan



Urusan Kearsipan



Gambar Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember



3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju			
MISI :Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Tujuan 1 Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tatakelola Arsip Pemerintahan Yang Akuntabel	1. Sasaran 1.1 Meningkatkan Gemar Membaca Masyarakat 2. Sasaran 1.2 Meningkatkan tata kelola arsip 3. Sasaran 1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	1. Strategi 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan, literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial 2. Strategi 1.2 Meningkatkan dan mengembangkan SDM dan sistem pengelolaan kearsipan melalui kompetensi, pembinaan, Bimbingan Teknis dan Monitoring dan Evaluasi di OPD, BUMD Desa dan kelurahan, serta ORMAS/ORPOL 3. Strategi 1.3 Meningkatkan sistem manajemen kinerja berbasis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang	1. Arah Kebijakan 1.1 Mendorong dan menciptakan akses seluas-luasnya pada literasi informasi perpustakaan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember 2. Arah Kebijakan 1.2 Mendorong pengelolaan dan mengembangkan insfrstruktur kearsipan OPD, BUMD, Desa dan kelurahan, serta ORMAS/ORPOL di Kabupaten Jember 3. Arah Kebijakan 1.3 Mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan monitoring dan evaluasi secara periodik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas ASN dalam perencanaan kinerja.
---	--	---	--

		terintegrasi	
--	--	--------------	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat tang berkualitas serta merata	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tatakelola Arsip Pemerintahan Yang Akuntabel				Indeks pembangunan literasi masyarakat dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Gemar Membaca Masyarakat			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	
				Meningkatnya pengelolaan perpustakaan daerah	Jumlah Pengunjung perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
						Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	

						Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat daerah	Jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

						Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
				Meningkatnya pelestarian naskah kuno daerah	Jumlah naskah kuno daerah yang didaftarkan dan dilestarikan	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
						Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	

				Meningkatnya koleksi budaya etnis nusantara daerah	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
						Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
		Meningkatnya tata kelola arsip			presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara standar		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis		Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis daerah	Jumlah arsip dinamis lembaga kearsipan daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
						Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
						Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	

						Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
						Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
						Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya tata kelola arsip statis daerah	Jumlah arsip statis lembaga kearsipan daerah	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
						Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	

						Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Meningkatnya tata kelola SIKN/JIKN daerah	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
						Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
				Terlaksananya pemusnahan arsip daerah yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	

						Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang diselamatkan	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	
						Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	
				Terlaksananya penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	Jumlah daftar perangkat daerah akibat penggabungan dan/atau pembubaran yang arsipnya diselamatkan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	

						Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip dan hasil alih media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar arsip yang dilakukan autentikasi dan dialih media	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	

						Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
						Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		1. Persentase Indikator Program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks Profesional ASN		

				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terselenggaranya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian perangkat daerah secara tertib, efektif, dan akuntabel.	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah melalui penyediaan barang dan jasa secara tertib, efektif, dan akuntabel.	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara tertib, efektif, dan akuntabel.	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara tertib, efektif, dan akuntabel	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
PEMERINTAHKABUPATENJEMBER

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.641.543.596,00		4.627.552.581,07		4.617.794.009,45		4.607.648.036,35		4.580.946.457,97		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.288.143.596,00		4.185.037.321,07		4.131.027.223,45		4.072.204.571,35		3.991.958.646,97		

Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	80,99	81,33	4.288.143.596,00	81,50	4.185.037.321,07	81,66	4.131.027.223,45	81,80	4.072.204.571,35	82,00	3.991.958.646,97	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	66,67	75		80		85		90		95			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	77,80	79		80		81		82		83			
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	0,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		2		2		3		2			
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	0,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.412.956.952,00		3.161.188.708,07		3.146.655.601,45		3.150.655.602,35		3.155.655.601,97		
Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	25	3.412.956.952,00	25	3.161.188.708,07	30	3.146.655.601,45	30	3.150.655.602,35	35	3.155.655.601,97		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.297.396.952,00		3.061.188.708,07		3.071.655.601,45		3.075.655.602,35		3.080.655.601,97		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	25	3.297.396.952,00	25	3.061.188.708,07	30	3.071.655.601,45	30	3.075.655.602,35	35	3.080.655.601,97		
2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				115.560.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	115.560.000,00	12	100.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.676.800,00		20.900.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00		15.900.000,00		
Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	3.676.800,00	4	20.900.000,00	4	20.900.000,00	4	20.900.000,00	4	15.900.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2		3		3		4		4			
2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				3.676.800,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	3.676.800,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		4.400.000,00		4.400.000,00		4.400.000,00		4.400.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	4	4.400.000,00	4	4.400.000,00	4	4.400.000,00	4	4.400.000,00		
2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00	20	1.500.000,00		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.316.100,00		233.890.000,00		223.890.000,00		193.880.000,00		164.880.000,00		
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	211.316.100,00	5	233.890.000,00	5	223.890.000,00	5	193.880.000,00	5	164.880.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1					
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.674.800,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.674.800,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		5.000.000,00		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				86.410.300,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	86.410.300,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	10.000.000,00		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.768.000,00		10.010.000,00		10.010.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	9.768.000,00	2	10.010.000,00	2	10.010.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00		
2.23.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				14.700.000,00		25.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	14.700.000,00	1	25.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.465.000,00		9.380.000,00		9.380.000,00		9.380.000,00		9.380.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	6	1.465.000,00	6	9.380.000,00	6	9.380.000,00	6	9.380.000,00	6	9.380.000,00		
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.298.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		125.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31	50	94.298.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	125.000.000,00	50	115.000.000,00		
2.23.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		45.000.000,00		40.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	45.000.000,00	3	40.000.000,00	3	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		3		3		4			
2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		25.000.000,00		20.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	2	20.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				531.041.144,00		454.637.175,00		454.637.175,00		454.637.175,00		454.637.175,00		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	531.041.144,00	2	454.637.175,00	2	454.637.175,00	2	454.637.175,00	2	454.637.175,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.050.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	3.050.000,00	2	4.500.000,00	2	4.500.000,00	2	4.500.000,00	2	4.500.000,00		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.722.184,00		200.137.175,00		200.137.175,00		200.137.175,00		200.137.175,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	180.722.184,00	12	200.137.175,00	12	200.137.175,00	12	200.137.175,00	12	200.137.175,00		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				347.268.960,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	347.268.960,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.152.600,00		259.421.438,00		234.944.447,00		227.131.794,00		175.885.870,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	129.152.600,00	1	259.421.438,00	1	234.944.447,00	1	227.131.794,00	1	175.885.870,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		17		18		19		20			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50			
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.592.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	23.592.000,00	1	50.500.000,00	1	50.500.000,00	1	50.500.000,00	1	50.500.000,00		
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.089.200,00		150.080.000,00		125.000.000,00		115.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	83.089.200,00	17	150.080.000,00	18	125.000.000,00	19	115.000.000,00	20	100.000.000,00		
2.23.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	19.000.000,00	50	40.000.000,00	50	40.000.000,00	50	35.000.000,00	50	10.000.000,00		
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.471.400,00		8.841.438,00		9.444.447,00		16.631.794,00		5.385.870,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	3.471.400,00	1	8.841.438,00	1	9.444.447,00	1	16.631.794,00	1	5.385.870,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				353.400.000,00		387.515.260,00		426.266.786,00		468.893.465,00		515.782.811,00		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	51.000	53.000	353.400.000,00	54.000	387.515.260,00	55.000	426.266.786,00	56.000	468.893.465,00	57.000	515.782.811,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				181.261.800,00		234.628.060,00		221.379.586,00		246.456.265,00		281.845.611,00		
Meningkatnya pengelolaan perpustakaan daerah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	75	125	181.261.800,00	125	234.628.060,00	125	221.379.586,00	150	246.456.265,00	150	281.845.611,00		
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	484	125		125		125		125		125			
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	10	0		5		5		5		5			

	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	115.128	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	85	0		5		5		5		5			
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10	0		5		5		5		5			
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				24.000.000,00		16.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		32.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	75	125	24.000.000,00	125	16.000.000,00	125	24.000.000,00	150	24.000.000,00	150	32.000.000,00		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		37.500.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	85	0	0,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	37.500.000,00		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		4.800.000,00		4.800.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		

Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10	0	0,00	5	4.800.000,00	5	4.800.000,00	5	9.600.000,00	5	9.600.000,00		
--	--	----	---	------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.662.400,00		92.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	484	125	69.662.400,00	125	92.000.000,00	125	60.000.000,00	125	60.000.000,00	125	65.000.000,00		
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				56.599.400,00		56.828.060,00		62.579.586,00		67.856.265,00		84.745.611,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	115.128	2.500	56.599.400,00	2.500	56.828.060,00	2.500	62.579.586,00	2.500	67.856.265,00	2.500	84.745.611,00		
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	10	0	0,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	7.500.000,00	5	8.000.000,00		
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				31.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	5	31.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				172.138.200,00		152.887.200,00		204.887.200,00		222.437.200,00		233.937.200,00		
Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat daerah	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0	0	172.138.200,00	1	152.887.200,00	1	204.887.200,00	1	222.437.200,00	1	233.937.200,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Gerakan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	12	20		30		40		50		60			
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	121	150		150		150		150		150			
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1	0	0,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				58.901.000,00		4.650.000,00		46.650.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		

Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	5	5	58.901.000,00	5	4.650.000,00	5	46.650.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00		
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.500.000,00	1	25.000.000,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				68.437.200,00		68.437.200,00		73.437.200,00		76.937.200,00		80.937.200,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	12	20	68.437.200,00	30	68.437.200,00	40	73.437.200,00	50	76.937.200,00	60	80.937.200,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				44.800.000,00		44.800.000,00		44.800.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	121	150	44.800.000,00	150	44.800.000,00	150	44.800.000,00	150	48.000.000,00	150	48.000.000,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				0,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	4	15	0,00	20	55.000.000,00	25	60.500.000,00	30	66.550.000,00	35	73.205.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya pelestarian naskah kuno daerah	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	4	0	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	8	0		10		10		10		10			

2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
---	--	--	--	------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	8	0	0,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	4	0	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		5.000.000,00		10.500.000,00		16.550.000,00		23.205.000,00		
Meningkatnya koleksi budaya etnis nusantara daerah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	0	0,00	5	5.000.000,00	5	10.500.000,00	5	16.550.000,00	5	23.205.000,00		
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	0		0		5		5		5			
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0,00		5.000.000,00		5.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	0	0,00	5	5.000.000,00	5	5.500.000,00	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00		

2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0,00		0,00		5.000.000,00		6.550.000,00		8.205.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	0	0,00	0	0,00	5	5.000.000,00	5	6.550.000,00	5	8.205.000,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				235.600.000,00		314.160.000,00		345.576.000,00		380.133.600,00		418.146.960,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				235.600.000,00		259.160.000,00		285.076.000,00		313.583.600,00		344.941.960,00		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	33	33,10	235.600.000,00	33,15	259.160.000,00	33,20	285.076.000,00	33,25	313.583.600,00	33,30	344.941.960,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				91.112.000,00		131.112.000,00		155.028.000,00		173.028.000,00		194.786.360,00		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis daerah	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)			91.112.000,00		131.112.000,00		155.028.000,00		173.028.000,00		194.786.360,00		
	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)													
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)													
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	3.948	2.500		2.500		2.500		2.500					
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)													

2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				91.112.000,00		41.112.000,00		50.028.000,00		50.028.000,00		62.386.360,00		
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	3.948	2.500	91.112.000,00	2.500	41.112.000,00	2.500	50.028.000,00	2.500	50.028.000,00	2.500	62.386.360,00		
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0,00		90.000.000,00		105.000.000,00		123.000.000,00		132.400.000,00		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)			0,00		90.000.000,00		105.000.000,00		123.000.000,00		132.400.000,00		
2.24.02.2.01.0005 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0		0		0		0		0		
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)			0		0		0		0		0		
2.24.02.2.01.0008 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip				0		0		0		0		0		
Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)			0		0		0		0		0		
2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)			0		0		0		0		0		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				144.488.000,00		63.048.000,00		65.048.000,00		75.555.600,00		80.155.600,00		
Meningkatnya tata kelola arsip statis daerah	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	3.131	100	144.488.000,00	100	63.048.000,00	100	65.048.000,00	100	75.555.600,00	100	80.155.600,00		
	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	0	0		1		1		1		1			
2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.24.02.2.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip				0,00		8.560.000,00		10.560.000,00		11.067.600,00		15.667.600,00		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	0	0	0,00	1	8.560.000,00	1	10.560.000,00	1	11.067.600,00	1	15.667.600,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				144.488.000,00		44.488.000,00		44.488.000,00		49.488.000,00		49.488.000,00		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	3.131	100	144.488.000,00	100	44.488.000,00	100	44.488.000,00	100	49.488.000,00	100	49.488.000,00		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola SIKN/JIKN daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	1	0	0,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		37.500.000,00		
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	1	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	37.500.000,00		

2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	32.500.000,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				0,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0	10	0,00	15	55.000.000,00	20	60.500.000,00	25	66.550.000,00	30	73.205.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		27.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		27.000.000,00		
Terlaksananya pemusnahan arsip daerah yang memiliki retensi dibawa 10 tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	0	0	0,00	100	27.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	27.000.000,00		
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		27.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		27.000.000,00		
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	0	0	0,00	100	27.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	27.000.000,00		
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	10.000.000,00		

2.24.03.2.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	10.000.000,00		
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				0,00		0,00		20.000.000,00		0,00		24.000.000,00		
Terlaksananya penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	0	0	0,00	0	0,00	10	20.000.000,00	0	0,00	10	24.000.000,00		
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	0	0		0		5.000		0		5.000			
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		12.000.000,00		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	0	0	0,00	0	0,00	10	10.000.000,00	0	0,00	10	12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		12.000.000,00		

Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	5.000	10.000.000,00	0	0,00	5.000	12.000.000,00		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				0,00		18.000.000,00		10.500.000,00		21.550.000,00		12.205.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip dan hasil alih media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	0	0	0,00	100	18.000.000,00	100	10.500.000,00	100	21.550.000,00	100	12.205.000,00		
	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	0	0		100		100		100		100			
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		9.000.000,00		5.500.000,00		11.550.000,00		7.000.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	0	0	0,00	100	9.000.000,00	100	5.500.000,00	100	11.550.000,00	100	7.000.000,00		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		9.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		5.205.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	0	0	0,00	100	9.000.000,00	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	5.205.000,00		

Penetapan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang layanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember dan RPJMD Kabupaten Jember.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINETAHUN	TARGETTAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN									

2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah (Indeks)	Indeks	55,45	65	75	85	95	100	100	
3.	presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara standar(Nilai)	Nilai	57,4	65	70	75	80	85	90	
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,7	70	80	85	90	100	100	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN2024	TARGETTAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERPUSTAKAAN										
2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah (Indeks)	positif	Indeks	55,45	65	75	85	95	100	100	
3.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	positif	Nilai	62,7	70	80	85	90	100	100	
4.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KEARSIPAN										
5.	presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara standar(Nilai)	positif	Nilai	57,4	65	70	75	80	85	90	
6.	Tingkatketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun		%	63,72	65	70	75	80	85	90	

7.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbahasa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Nilai	0	5	10	15	20	25	30	
----	---	--	-------	---	---	----	----	----	----	----	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan

juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Jember

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jember government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER" at the top and "DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN" at the bottom. In the center of the stamp is the official emblem of Kabupaten Jember. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. MURDIYANTO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 196603301 198602 1 003